**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Wulan Mardhatillah
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus,SH.,MH
Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M
Alamat: Jln. Kembang Harapan Gang Seliangguri
Email / Telepon : wulanmardhatillah09@gmail.com / 0822-8847-7636

ABSTRACT

Law Number 36 of 2009 concerning health indicates that every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to live healthily for its inhabitants including for the poor who cannot afford it. Efforts to realize this right, the government must provide health services that are equitable, fair and affordable for all levels of society. For this reason, the government needs to make efforts to ensure equitable access for all citizens to obtain health services. Article 52 of the Presidential Decree paragraph (1) letter r excludes the public from receiving health services due to criminal acts of persecution, sexual violence, victims of terrorism, and criminal acts of trafficking in persons.

This research will be compiled using the juridical normative type of research, which is research that is focused on examining the application of norms in positive law. The approach used in this research is to use a normative approach, namely literature law research.

The results of the research conducted by the author are, first to find out how legal protection and state responsibility in the context of protecting human rights and to get the right to health services for the community is part of the implementation of protection of human rights, then to know the legal ideas on health rights. Citizens have the right to guarantee good health services, and prioritize the safety or life of patients without first paying attention to the cause and effect of why the victim becomes sick, and presidential regulations or other government regulations do not make an exception to which victims have the right to be accepted when they want to seek treatment.

Keywords: State Responsibility - Health Services

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹

Menurut Lawrence M. Friedman, memahami hukum tentu saja termasuk memahami penegakan hukum, harus diletakkan dalam konteks sistem hukum, yang mencakup komponen struktur, substantif, dan komponen kultur. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerja sistem hukum itu. Komponen hukum substantif, yaitu berupa aturan-aturan atau materi hukum, sementara hukum kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi tegaknya atau bekerjanya hukum, baik kultur didalam internal hukum itu sendiri (penegak hukum) maupun kultur eksternal, yaitu budaya masyarakat pada umumnya.²

Berdasarkan landasan utama bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban pemerintah, kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan

sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.³ Kewajiban pemerintah ini juga ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 yang mana menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 29 huruf b yang berbunyi memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Dalam bidang kesehatan lebih jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan khususnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, serta setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Apakah gagasan hukum bagi pemenuhan hak atas kesehatan agar sesuai dengan Hak Asasi Manusia khususnya korban kekerasan seksual.

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.1.

² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, Hlm.28.

³ Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 28

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pelayanan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui gagasan hukum bagi pemerintahan tentang jaminan pelayanan kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia khususnya korban kekerasan seksual

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan pelayanan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian tanggung jawab Negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁵ Teori kodrati mengenai

hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.⁶

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara atau *state responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah "*responsibility*" digunakan untuk menunjukan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah "*liability*". Digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab negara adalah suatu keharusan bagi seseorang atau Negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸
2. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan

Pada Jurnal Konstitusi", *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.146.

⁶ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 12

⁷ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, hlm.39

⁸ Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm 51

⁵ Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel

sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹

3. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan,¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹²

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap konsolidasi hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu dalam meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹³

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hlm 286

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta, Rineka cipta, 2010 hlm 29

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2006, hlm. 295

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.23

¹³ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik yang jenis berlainan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*liberary research*), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistic atau matematika atau pun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁴

¹⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat, yang tidak bisa terlepas dari dalam dan kehidupan manusia.¹⁵

Secara ringkas, tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut, pertama munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap para raja. Isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyatnya.¹⁶

Kedua, keluarnya *Bill Of Rights* pada 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, untuk memanjarkan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dimaksud mengandung pengertian secara tersirat bagi hidup dan kehidupan manusia. Dalam

memperhatikan isi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa bangsa Indonesia mengakui tentang adanya hak-hak manusia, dan hak-hak dan kewajiban warga negara.¹⁷ Definisi politis Ham menunjuk pada pengertian politik, politik berarti proses dinamis dalam arti luas yakni berkembangnya masyarakat suatu negara tertentu termasuk didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijakan pemerintah dan upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan hukum mengandung arti *impartiality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan sama dalam arti tidak mutlak.¹⁸ Setelah baru diambil keputusan, maka keputusan itu harus dilaksanakan.

B. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tentang Tanggung Jawab Negara

Negara adalah organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami wilayah tertentu yang mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka. Dalam suatu wilayah, organisasi negara bukan satu-satunya organisasi, melainkan adanya organisasi lain, diantara organisasi-organisasi tersebut negara merupakan

¹⁵ Widjaja, *op.cit.* hlm 42

¹⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.13.

¹⁷ Bambang Sugono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 4

¹⁸ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : dimana harus dimulai ?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2012

organisasi utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu campur tangan dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.¹⁹

Pertanggungjawaban berasal dari kata dari tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *Liability* dan *Responsibility*.²⁰

Istilah tanggung jawab hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.²¹

2. Macam-macam Tanggung Jawab Negara

Macam-macam tanggung jawab negara:²²

- a) Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang dibuatnya dengan negara lain dan

pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lain.

- c) Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara dikenal adanya *causula alvo* yang menetapkan bahwa penerimanya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Dalam lebih dari dua dekade ini kalangan kesehatan lebih akrab dengan disiplin ilmu hukum. Dua disiplin ilmu tertua ini pada awal berkembang pada wilayahnya masing-masing. Hukum mengatur tentang ketertiban dan ketetraman hidup bermasyarakat sementara kedokteran dan kesehatan mengatasi masalah-masalah kesehatan

¹⁹ Zulkarnaen, *Op.cit*

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.315.

²¹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Inrernasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm.174.

²² Huala Adolf, *Op.cit*

masyarakat. Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Hukum kesehatan adalah peraturan perundangan-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan.²³

2. Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraann Upaya Pelayanan kesehatan

Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan tidak terlepas dari penegakan hukum.

a) Badan Pertimbangan Kesehatan

Mengenai badan pertimbangan kesehatan diatur mulai pasal 175 dan seterusnya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 175 ditentukan bahwa badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan.

Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di pusat dan daerah. Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan badan pertimbangan kesehatan nasional (BPKN) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Sedangkan Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Kedudukan BPKN dan BPKD berada sampai pada tingkat kecamatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan dan Pancasila (sumber dari

segala sumber hukum) sebagai dasar negara, memuat ajaran tentang hak-hak asasi manusia. Kalau kita menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1) Alinea pertama: mengandung pengakuan adanya hak asasi disamping kewajiban asasi. Hak asasi manusia baik perorangan maupun sebagai bangsa berdasarkan martabat manusia dan keadilan.
- 2) Alinea kedua : mengandung adanya pengakuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perwujudan dan keinginan ini terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- 3) Alinea ketiga : mengandung adanya pengakuan terkandung didalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi di bidang sosial budaya dan politik.
- 4) Alinea ke empat : lebih menjelaskan dan menekankan pengakuan hak-hak asasi pada alinea pertama, kedua dan ketiga (keterpaduan) karena alinea keempat menyimpulkan pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu dalam segala bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam.²⁴

Dapat difahami bahwa konsep ham tidak sama seperti konsep hak lainnya, ham dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya, secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama, oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasi kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat, secara yuridis konsep ham harus dimaknai sebagai hubungan hukum *sui generis* antara penyandang hak atau pihak yang

²³ *Op.cit.*, Cecep Triwibowo

²⁴ Widjaja, *Op.cit.*, hlm.66.

berhak (rakyat), penanggung jawab hak atau pihak yang berkewajiban atas suatu hak (negara). Ham adalah klaim dari rakyat atau warga negara terhadap negaranya supaya dipenuhi apa yang menjadi hak asasinya.²⁵

Kesehatan juga termasuk dalam ham, hak sehat juga terdapat dalam Undang-Undang HAM, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan mengenai hak sehat juga diatur oleh negara dalam Pasal 4 Undang-undang kesehatan yaitu setiap orang berhak atas kesehatan kemudian dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Ketentuan tentang ham dalam pelayanan kesehatan diantaranya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang kesehatan yang berbunyi setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, penyebutan kata setiap orang “dalam Undang-undang ini berarti siapa pun tanpa terkecuali dan berarti tidak boleh terjadi diskriminasi dalam hal kesehatan”.²⁶

B. Gagasan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Sesuai dengan Hak Asasi Manusia Khususnya Korban Kekerasan Seksual

Leenen mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang secara spesifik diterapkan dalam pelayanan kesehatan mempunyai landasan yang bersifat teori sendiri, yang ia maksudkan dalam kaitan ini ialah khususnya yang menyangkut dua buah hak dasar yang merupakan landasan hukum kesehatan.²⁷

1) Hak atas pelayanan kesehatan

2) Hak manusia untuk menentukan nasibnya sendiri

Hukum kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan. Dari penjelasan ini dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut; a) serangkaian ketentuan hukum yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan; b) hubungan antara pasien dengan masyarakat dengan tenaga kesehatan, c) upaya pelaksanaan kesehatan.²⁸

Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Ketentuan jaminan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah komitmen politik negara, hal ini telah menyelesaikan berbagai tuntutan politik dan harapan rakyat, tetapi dari perspektif hukum tata negara, hal tersebut masih mengandung persoalan. Persoalan utama terkait dengan beragamnya batasan atau definisi hak atas kesehatan. Dalam kepustakaan kesehatan, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut hak asasi manusia di bidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to health*), atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard To Health*).²⁹

²⁵ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hlm.10-11.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Freddy Tengker, *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.16

²⁸ Zaeni Aayhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.5.

²⁹ Eleantor D. Kinney, “*The International Human Right to Health*”, dalam *Indiana Law Review*, Vol 34, No. 01 September 2005, hlm, 1559

Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (Undang-Undang) namun juga pada yurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).³⁰ Hukum kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, dengan demikian dapat dibayangkan bahwa sumber hukum kesehatan cukup luas dan kompleks.

Gagasan hukum terhadap hak kesehatan sesuai dengan hak asasi manusia khususnya korban kekerasan seksual, penulis memahami bahwa ide-ide yang diberikan oleh penguasa dalam membentuk suatu peraturan sangatlah baik karena mengacu kepada Undang-Undang yang terkait, namun yang menjadi perhatian khusus bagi penulis ialah masih adanya pengecualian terhadap warga negara yang ingin berobat kerumah sakit walaupun mereka telah memiliki kartu-kartu yang telah dianjurkan pemerintah, seharusnya tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan itu diemban para pejabat nasional di negara-negara yang berdasarkan hukum khususnya bagi korban kekerasan seksual. Perlindungan tidak hanya terbatas pada keamanan kelangsungan hidup dan fisik kekerasan yang menjadi korban. Dalam kondisi apapun negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga mereka dan setiap orang dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi. atau yang membuat masyarakat resah dan kecewa itu segera diakhiri dan di rubah agar perlindungan hak asasi manusia warga negara serta tanggung jawab negara terhadap korban-korban itu dalam jaminan pelayanan kesehatan itu terlaksana dengan apa yang diharapkan.

³⁰ Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hlm.5.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara terhadap hak atas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dan (2). Akan tetapi kehadiran Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (1) huruf r menimbulkan permasalahan dan bertentangan dengan peraturan Undang-Undang di atasnya. Karena sama sekali tidak berspektif kepada korban dan melanggar hak asasi manusia.
2. Gagasan hukum terhadap hak atas kesehatan pada Perpres Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (1) huruf r, harapan saya sebaiknya dihapuskan atau digantikan karena dinilai diskriminatif terhadap korban yang membuat masyarakat resah dan kecewa itu segera diakhiri dan di rubah. Serta dibuat aturan yang lebih tegas sesuai dengan tanggung jawab negara, seperti tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan itu diemban para pejabat nasional di negara-negara yang berdasarkan hukum. Dalam kondisi apapun negara-negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga mereka dan setiap orang dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi. Oleh sebab itu negara harus mempunyai kewajiban terhadap masyarakat sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Saran

1. Perlindungan hukum dan tanggung jawab negara dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan HAM, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, Sebab hak kesehatan juga merupakan hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.
2. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ide-ide atau gagasan hukum di Indonesia, warga negara berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang baik tanpa diskriminasi dan mengutamakan keselamatan atau nyawa pasien tanpa memperhatikan terlebih dahulu sebab dan akibat kenapa si korban menjadi sakit, dan peraturan presiden atau peraturan pemerintah lainnya tidak membuat pengecualian terhadap korban mana yang berhak diterima saat ingin berobat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arinanto, Satya 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alston, Philip, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Aayhadie, Zaeni 2018, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Angrayni, Lysa, 2016, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Dwicaksono, et.al, Adenantera, 2010, *Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di Daerah*, Perkumpulan Inisiatif, Bandung.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR PRESS, Pekanbaru.
- Gandhi, Mahatma, 2005, *Prinsip Hidup Pemikiran dan Konsep Ekonomi*, Nusamedia dan Nuansa, Jakarta.
- _____, 2007, *Prinsip Hidup Pemikiran dan Konsep Ekonomi*, Alappat, Prancis.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung

- Keliat, Agus Catur Aryanto, dkk, Makmur, 2016, *Tanggung Jawab Negara*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
- Komnas, Booklet, Perempuan, 2013 *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Moh, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- K. M. Smith, dkk, Rhona, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Suparman, 2010, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, A, 2007, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Aditama, Bandung.
- Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, Marsudi, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka cipta Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, 2004, *Ilmu Negara Republik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Octorina Susanti dan A'an Efendi, Dyah, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Teguh, 2013, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Hak Asasi Manusi Dalam Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Rover, C De, 2000, *To Serve And To Protect Human Right And Huminatarian Law For Police And Security Forces*, Penerjemah Supardan Mansyur, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Slamet, Titon, Kurnia, 2006, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai Ham di Indonesia*, PT Alumni Bandung.
- Sumarsono , 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Putaka Utama, Jakarta.
- Sunggono dan Aries Harianto, Bambang, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Ta'adi, 2013, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Tengker, Freddy, 2010, *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*, Mandar Maju, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, 2000, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, Danny, 2010, *Penuntutan Kuliah Hukum Kedokteran*, Edisi Kedua, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan: beberapa catatan bagi Indonesia*, *Jurnal Politica*, Jakarta, 2006.

Eleantor D. Kinney, “*The International Human Right To Health*” *Jurnal Hukum* Volume 34, No. 01 Tahun 2005

Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id>

Endang Kusuma Astuti, “Peran BPJS Kesehatan dalam Mewujudkan Hak atas Pelayanan Kesehatan Warga Negara Indonesia” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Volume 01, No, 01 tahun 2020.

Erdiansyah, “Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi”, *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah*

Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010.

Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015. Diunduh Dari <https://Scholar.Google.Co.Id>.

Helena Lambert, “Protection Against Refoulement From Europe : Human Rights Law Comes to the Rescue”, *Cambridge University Press*, Vol 48 Maret 2019, hlm. 515, Diunduh dari :<https://next.Westlaw.com/Document>.

Hernadi Affandi, “Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 4 No 1 Juni 2019,

Joyce Chia & Justin Susan Kenny, “The Children of Mae La: Reflection on Regional Refugee Cooperation”, *Melbourne Journal of Internasional Law*, Vol. 13 No. 3 November 2012.

Martius Sardi, Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, No. 1 2016

Nur Asmarani, “Teori Hak Asasi Manusia (HAM)” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol 14, No. 1 Januari 2015, diunduh dari <https://scholar.Google.co.id>

R. Herlambang Perdana Wiratman, *Jurnal Ilmu Hukum*, YURIDIKA, Volume. 20, No 1 Januari 2005,

Rio Mardion, "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparat Penegak Hukum Bagi Pengawasan Psiotropika Di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019.

ST. Paul Mercury Indem, "Supreme Court Of The United States", U.S. Government Works, 2016, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://fh.unri.westlaw.com/Document/>, Pada Tanggal 20 Mei 2020 dan diterjemahkan oleh Google translate.

Widia Etorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : dimana harus dimulai ?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2012,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

D. Website

<https://makassar.terkini.id/miris-bpjs-tidak-menanggung-pemeriksaan-medis-korban-perkosaan/>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/12/13/kita-protos-pepres-no-82-tahun-2018>. Diakses, pada tanggal 11 februari 2020.

<https://m.detik.com/news/kolom/korban-tindak-pidana--tidak-ditanggung-bpjs>. Diakses Pada tanggal 04 Maret 2020